

Hujan Buatan untuk Atasi Karhutla

● RIZKY SURYA

Pemerintah dinilai perlu meninjau ulang izin konsesi.

MEULABOH — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tiga kecamatan di Aceh Barat dapat dipadamkan dengan hujan buatan. “Jika melihat luas lahan yang terbakar ini, sulit rasanya bisa dipadamkan secara manual. Paling tidak dengan hujan buatan. Itu baru bisa maksimal,” kata Koordinator Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Aceh Barat, Mashuri, Sabtu (3/8).

Menurut dia, karena peralatan yang tersedia dan terbatasnya personel untuk melakukan pemadaman lahan di tiga kecamatan meliputi Meureubo, Bubon, dan Johan Pahlawan tersebut, pihaknya berharap BPBA atau BNPB dapat memberikan bantuan penanggulangan agar sebaran titik api dapat segera berhenti. “Kemungkinan dengan hujan buatan kami prediksikan kebakaran hutan dan lahan di Aceh Barat dapat di-

atasi,” kata Mashuri menambahkan.

Pihaknya mengakui saat ini luas lahan yang sudah terbakar di Kabupaten Aceh Barat sudah mencapai 33 hektare lebih dan sebanyak 35 persen lahan di antaranya sudah bisa dipadamkan. Namun, meski sudah berhasil diatasi, di lokasi bekas kebakaran lahan muncul kembali titik api sehingga harus dilakukan pemadaman secara berulang oleh petugas. Sebaran api terbanyak ada di tiga desa, yaitu Desa Peulanteu, Desa Seuneubok Trap, serta Desa Suak Pangkat, Kecamatan Bubon.

Pihak BPBD mengakui, faktor musim kemarau menjadi pemicu utama terjadinya kebakaran lahan gambut di daerah tersebut dan musibah ini sudah terjadi sejak 1 Juli 2019 hingga saat ini.

Di tempat terpisah, petugas kepolisian di Kabupaten Aceh Barat kembali melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang warga di tiga desa, yaitu Desa Peulanteu, Seuneubok Trap, dan Suak Pangkat, Kecamatan Bubon, terkait peristiwa kebakaran lahan yang melanda daerah ini sejak dua pekan terakhir. Sebelas orang warga yang diperiksa dan dimintai keterangan tersebut merupakan pemilik kebun atau lahan yang terbakar.

“Pemilik lahan yang kami perik-

sa ini untuk menyelidiki penyebab kebakaran hutan dan lahan saat ini terjadi di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat,” kata Kapolsek Bubon Iptu Utra.

Berdasarkan keterangan sementara yang diperoleh polisi, warga yang dimintai keterangan tersebut mengakui lahan mereka yang terbakar itu terbakar-tiba-tiba dan sebelum kebakaran terjadi tidak ada aktivitas sama sekali di lokasi kebun.

Warga menyatakan tidak mungkin mereka melakukan pembakaran lahan karena di lokasi kebakaran sudah terdapat tanaman produktif, seperti lahan kelapa sawit dan palawija serta tanaman lainnya yang memiliki nilai jual tinggi. “Dugaan sementara kebakaran lahan ini karena musim kemarau,” kata Iptu Utra menambahkan.

Moratorium

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyangkan kasus kebakaran hutan dan lahan terjadi terus-menerus. Agar karhutla tak lagi terjadi, Manajer Kampanye Pangan, Air, & Ekosistem Esensial Eknas Walhi Wahyu A Perdana menyampaikan, pemerintah perlu meninjau ulang izin konsesi, khususnya pada lahan konsesi yang terbakar. “Tindakan lebih jauh bisa dilakukan pen-

cabutan izin konsesi pada lahan konsesi korporasi yang terbakar berulang,” katanya dalam siaran pers.

Wahyu mengingatkan Presiden Joko Widodo harus segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung terkait karhutla. Ia memandang upaya PK pemerintah saat ini menjadi tidak relevan dan melukai hati rakyat. “Apalagi, di tengah fakta bahwa titik api dan kabut asap masih terus meningkat angkanya,” ujarnya.

Dia juga meminta Presiden Jokowi segera mengeluarkan moratorium permanen hutan primer dan ekosistem gambut yang selama beberapa pekan lalu menjadi wacana. Menurut dia, upaya moratorium ini wajib mempertimbangkan wilayah kelola rakyat. “Karena selama ini beberapa generasi hidup selaras dengan alam di kawasan hutan dan ekosistem gambut,” katanya.

Lebih lanjut, Walhi memaparkan data terkait titik panas secara nasional dari Januari hingga Juli 2019. Saat ini terdapat 4.258 titik panas dengan 2.087 di antaranya terletak di kawasan konsesi dan kesatuan hidrologi gambut (KHG). Dibandingkan dengan data konsesi yang berada di KHG, tercatat ada 613 perusahaan yang beroperasi di KHG.

■ antara ed: endah hapsari

